

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Anugerah dan bimbingan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 20189dapat disusun dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan ataupun hambatan yang kami alami dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami sangat mengharapkan masukan ataupun saran yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja ini. LKIP tahun 2019 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2019, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor:29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 dengan maksud menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 merupakan suatu pertanggungjawaban formal sebagai pengguna anggaran Organisasi Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bupati Kotawaringin Timur atas capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Secara umum sasaran atau indeks kerja utama (IKU) yang direncanakan tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik.

Kami berharap, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 ini akan mendapatkan

umpan balik dari masyarakat secara luas bagi peningkatan kinerja seluruh unit kerja di

lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur. Masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian kedepan.



Sampit, Januari 2020

MULTAZAM, ST, M.MT
Pembina Tingkat I
NIP.19680528 199903 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan ke dalam tujuan/sasaran strategis dimana mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021.

Sebagai upaya mencapai visi dan misi tersebut, Diskominfo menjabarkannya ke dalam indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian target yang telah ditentukan. Secara umum kinerja Diskominfo pada tahun 2019 telah mencapai sasaran yang belum ditentukan meskipun belum optimal, dimana 2 IKU yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan kategori “Berhasil” karena nilai capaian berada pada rentang 80% - 100%. Sehingga rata-rata dari semua IKU yang telah ditetapkan ialah sebesar 150% (Sangat Berhasil)

Beberapa masalah utama yang dihadapi pada tahun 2019 adalah belum memadainya jumlah SDM yang memenuhi kompetensi bidang TIK yang menyebabkan hambatan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo dalam urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta belum adanya penambahan formasi ASN dengan kompetensi bidang TIK. Minimnya anggaran terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF..... iii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran umum organisasi..... 1

B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kotim 4

C. Dasa r Hukum..... 7

D. Siste m Penyajian..... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 10

2.1. Rencana Strategis 2016-2021 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 12

A. Capaian Kerja Organisasi..... 12

B. Realisasi Anggaran..... 14

BAB IV KESIMPULAN..... 27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut DISKOMINFO dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 41) yang kemudian seiring dengan beban kerja yang meningkat dan tidak sesuai jumlah pegawai yang tersedia sehingga kemudian terbit Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Diskominfo juga fokus dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal dinas sendiri. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, Diskominfo dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh integritas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Transparansi dan Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Diskominfo, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2019 ini, Diskominfo masih memakai Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 41) sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah tercantum dan disepakati antara Diskominfo dan Bupati Kotawaringin Timur.

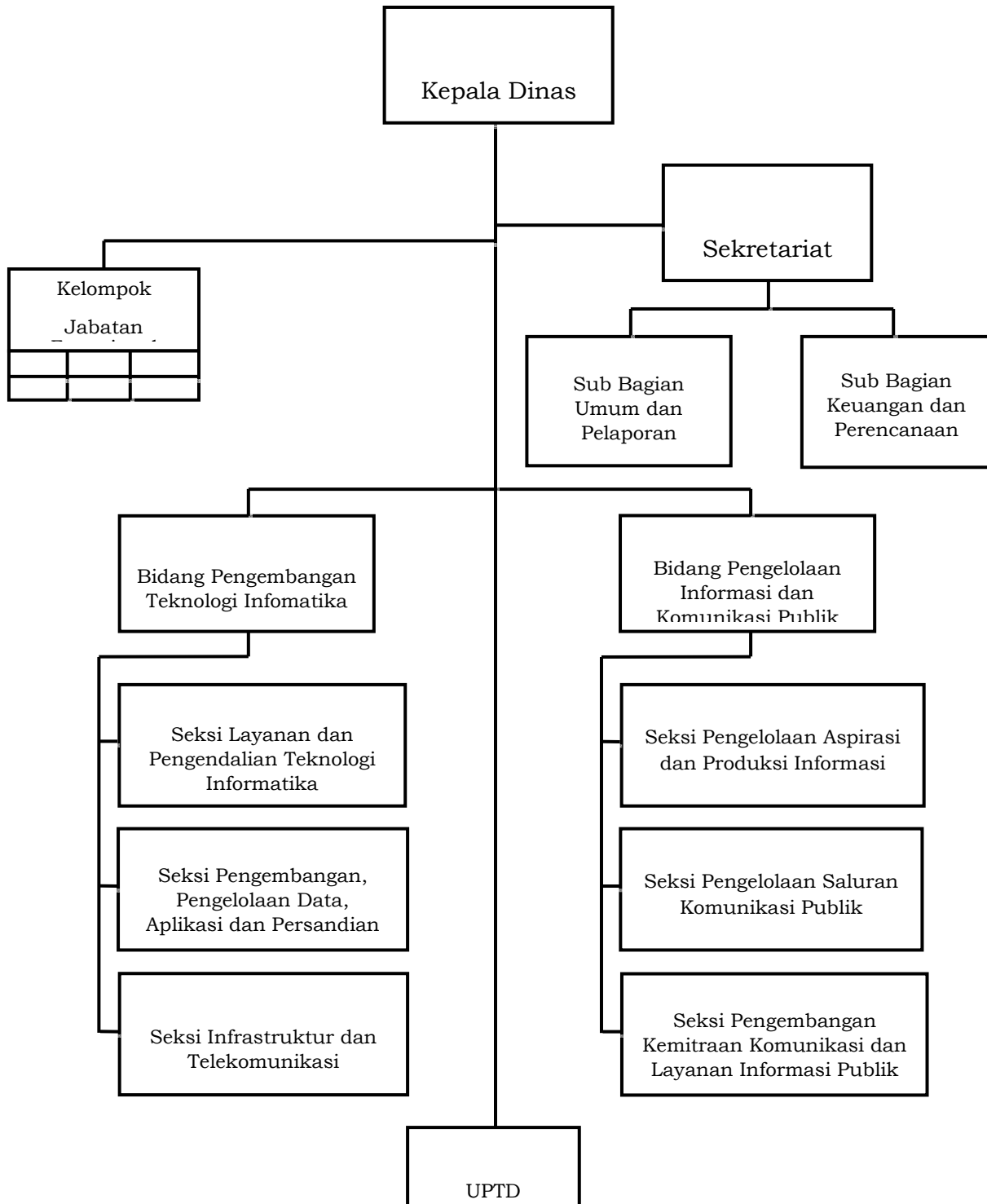
A.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Diskominfo dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.

Sebagai organisasi yang mengemban tugas menangani urusan wajib non pelayanan dasar, pengelolaan komunikasi publik, informatika, statistik dan persandian, Diskominfo telah mengalami beberapa pencapaian. Pencapaian tersebut merupakan berbagai hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diemban organisasi. Berikut nama-nama jabatan dan struktur organisasi yang terdapat pada Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris.
3. Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Informatika.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan.
6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
7. Seksi Layanan dan Pengendalian Teknologi Informatika
8. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data, Aplikasi dan Persandian.
9. Seksi Infrastruktur dan Telekomunikasi.
10. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi.
11. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.
12. Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi dan Layanan Informasi Publik.

Struktur Organisasi dan Tata Kelola
DiskominfoKabupaten Kotawaringin Timur



Gambar 1.1. Diagram Struktur Organisasi Diskominfo

Adapun fungsi dari Diskominfo yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, telekomunikasi, persandian, dan statistik sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, telekomunikasi, persandian, dan statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, telekomunikasi, persandian, dan statistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam menjalankan tugas dan fungsi, Diskominfo didukung oleh 18 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang Tenaga Kontrak dari berbagai bidang keahlian. Jumlah dan komposisi pegawai Diskominfo dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Diskominfo dan Tenaga Kontrak berdasarkan pendidikan

NAMA PERANGKAT DAERAH	S-2	S-1	D-III	SLTA/SMA	JUMLAH TOTAL
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim	3	10	3	10	26

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Diskominfo berdasarkan Golongan Ruang

NAMA PERANGKAT DAERAH	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	JUMLAH TOTAL
Dinas Komunikasi dan Informatika	2	1	7	2	1	1	1	2	1	18

B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk lebih memfokuskan strategi Diskominfo dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan

kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Kondisi dan potensi yang ada di Diskominfo merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi visi dan misi tersebut.

a. Faktor-faktor tantangan antara lain :

1. Distribusi Sistem Aplikasi dalam menerapkan e-government.
2. Pengelolaan website secara terintegrasi.
3. Legalitas penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
4. Jaminan Keamanan sistem TIK.
5. Kesenjangan kemampuan TIK masyarakat.

b. Faktor-faktor peluang antara lain :

1. Lembaga maupun institusi pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang bergerak dibidang TIK.
2. Regulasi/ peraturan yang mengatur pengembangan TIK, informatika (telematika) dan telekomunikasi.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
4. Partisipasi masyarakat pada pelatihan dibidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
5. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.
6. Penyelenggaraan statistik sektoral.
7. Penerapan fungsi GPR (*Government Public Relations*).
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Faktor-faktor kelemahan antara lain :

1. Belum memadainya jumlah SDM yang mempengaruhi kompetensi bidang TIK dan statistik yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo dalam urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
2. Belum adanya penambahan formasi ASN dengan kompetensi bidang TIK.
3. Sulitnya memantau/ monitoring isu public dari beberapa media cetak dan media sosial secara manual.
4. Minimnya jumlah responden pengguna layanan e-lapor yang merespon kuesioner survey.

5. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar SKPD atau e-government yang telah terpasang.
6. Sistem komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
7. Masih banyak wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak terjangkau sinyal komunikasi.
8. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan system informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.
9. Belum optimalnya fungsi KIM yang telah terbentuk.
10. Belum terbentuknya KIM di setiap kecamatan.

Dengan melihat faktor-faktor diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Diskominfo adalah terdiri dari :

1. Penyediaan aplikasi penunjang e-Government.

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Masih mempergunakan versi 3.6sp5, sedangkan untuk mendukung pelaksanaan pencengahan dan pemberantasan korupsi Kemendagri Nomor: 356/4429/SJ tanggal 21 Nopember 2016 dengan aksi transparansi dan akun tabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah wajib mempergunakan SPSE4.

2. Terbatasnya kapasitas akses internet dalam melayani kebutuhan data internet keseluruh OPD dan kecamatan, UPT.Kesehatan, UPT.Pendidikan.
3. Minimnya perangkat jaringan untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Perlunya meningkatkan infrastruktur jaringan dari jaringan berbasis wireless menjafi Fiber Optik (FO).
5. Kurangnya capaian target Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di semua kabupaten.
6. Memaksimalkan pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD.
7. Pelaksanaan temu pers yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum cukup mewujudkan berbagai harapan

bersama untuk terus memperbaiki dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

8. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
9. Pembangunan infrastruktur jaringan yang tersebar di wilayah kecamatan.
10. Komitmen antar bidang/ sekretariat maupun di dalam bidang/ sekretariat belum berjalan secara optimal. Antara lain dalam hal pengumpulan data, perencanaan, penganggaran dan kerjasama dalam hal pekerjaan.
11. Mengikutsertakan ASN Diskominfo mengikuti diklat, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan teknis di bidangnya.
12. Kurangnya pembinaan pemerintah terhadap kelompok informasi masyarakat.

C. Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang melandasi tugas dan fungsi Diskominfo, antara lain adalah :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
12. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Renja Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 /PER / M.KOMIN FO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245).

D. Sistem Penyajian

Bab. I – Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan system penyajian LKIP.

Bab. II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil revidi), tujuan, sasaran, indikator dan target Renstra selama lima tahun, lalu menjelaskan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Bab. III – Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab. IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaian serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2016 - 2021

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat perubahan terkait urusan-urusan tersebut diatas menjadi urusan yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan salah satu perangkat daerah baru yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2016 Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun target kinerja Diskominfo jika didasarkan pada perubahan RPJMD maka masuk pada Misi kedua seperti yang tergambar pada table 2.1 :

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas

Visi "Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera"		
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis Dinas
Misi Ketiga : "Mengembangkan Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Pemantapan Ketahanan Pangan, Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan"	Mewujudkan kualitas pos, telekomunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya layanan pos dan telekomunikasi - Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat. - Tersedianya SDM dan sarana prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) - Terwujudnya penyebaran informasi melalui media online.

Berdasarkan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan kewenangan serta tanggungjawab pada Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur, maka ditetapkan beberapa indikator utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator tersebut berupa ukuran kuantitas yang jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas. Adapun penjelasan/ formulasi dari tiap indikator yang telah ditetapkan ialah seperti tersaji pada table 2.2 :

Tabel 2.2 Formulasi IKU Diskominfo Tahun 2019

Sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/139/HUK-ORG/2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2019	Formulasi
Meningkatnya Penyebaran Informasi Melalui Media Online	Presentasi berita yang di upload melalui website pemda	5 berita/ minggu	Jumlah Berita SOPD/ Jumlah SOPD x 100%
Meningkatnya Layanan Internet Publik	Presentasi layanan internet public	1 titik	Jumlah akses point internet yang terpasang/ jumlah area publik x 100%

Pada proses pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan ditunjang oleh 3 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dan ditunjang oleh 10 program (4 program rutin program dasar dan 6 urusan wajib non dasar) dan program yang ada di uraikan dalam 31 kegiatan pada tahun 2019.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur nomor : 188.45/139/HUK-ORG/ 2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati nomor : 188.45/601/HUK-ORG/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 2 sasaran yang akan dicapai. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Uraian atau definisi perhitungan indikator kinerja pada Diskominfo pada tahun 2019 sebagai berikut :

Table 3.1 Definisi Indikator Kinerja Capaian Diskominfo Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target 2019	Definisi
Presentase berita yang diupload melalui website pemma	5 berita/ minggu	Jumlah berita SOPD yang di upload
Presentase layanan internet public	1 titik	Jumlah akses point internet yang terpasang

Metode evaluasi kinerja adalah dengan membandingkan indikator target yang telah ditetapkan dengan realisasi sehingga dapat diketahui persentase capaian dari indikator. Adapun cara penilaian capaian pada LKIP ini adalah sebagai berikut :

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja > 100%
2. Berhasil : 80-100%
3. Cukup berhasil : 60 – 79 %
4. Tidak berhasil :< 60%

Adapun realisasi indikator kinerja pada Diskominfo pada tahun 2019 ini adalah seperti terdapat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Target dan realisasi IKU Diskominfo Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya penyebaran informasi melalui media online	Jumlah berita yang di upload di website	5 berita/ minggu (240 berita)	2.986 berita	200%	Sangat Berhasil
	Terbangunnya jaringan komunikasi dan informatika	1 titik	1 titik	100 %	Berhasil
Rata-rata Presentase Capaian					

Berdasarkan tabel 3.2 maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dapat terealisasi dengan capaian “berhasil”. Sehingga rata-rata dari semua IKU yang telah ditetapkan adalah sebesar 150% dengan kategori “Sangat Berhasil”

Capaian Indikator

Pada proses pencapaian indikator kinerja pada IKU Jumlah berita yang di upload di website di dukung oleh 1 program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rincian output kegiatan penunjang indikator pertama Tahun Anggaran 2019

Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Keluaran/ Hasil	Target Kinerja		
		Target	Capaian	
Urusan Komunikasi dan Informatika				
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
Pengelolaan Website Daerah	Adanya media penyebaran informasi melalui media online	5 berita / minggu	2.986 berita	200 %

Anggaran untuk menunjang Indikator Kinerja Utama ini mencapai Rp. 193.703.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 169.614.500,- (87,56%).

Pada proses pencapaian indikator kinerja pada IKU Terbangunnya jaringan komunikasi dan informatika di dukung oleh 1 program yaitu Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rincian output kegiatan penunjang indikator pertama Tahun Anggaran 2019

Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Keluaran/ Hasil	Target Kinerja		
		Target	Capaian	
Urusan Komunikasi dan Informatika				
Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika				
Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Internet	Jumlah layanan internet publik	1 titik	1 titik	100 %

Anggaran untuk menunjang Indikator Kinerja Utama ini mencapai Rp. 421.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 393.779.163,- (93.40%).

B. Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2019 mengelola Pendapatan Asli Daerah, dan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 , Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dibebankan Pendapatan di sektor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.602.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.0,00. Hal ini di karenakan terbitnya Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tertanggal 4 November 2019, sehingga dalam waktu yang singkat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan sosialisasi dan penagihan kepada wajib Retribusi Daerah.

Sedangkan Anggaran dan realisasi Belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp.5.182.437.250,00 terealisasi sebesar Rp.4.695.486.868,00 atau mencapai 90,60 %.

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2019 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Realisasi kinerja dan anggaran Diskominfo Tahun 2019

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	8.850.000	7.545.000	85,25%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	141.900.000	99.144.703	69,87%
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	15.300.000	3.259.600	21,30%
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium PNS dan non PNS	322.664.584	280.405.095	86,90%
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	42.028.840	35.617.500	84,75%
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	40.300.000	40.265.000	99,91%
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.125.000	12.115.000	99,92%
8.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	25.599.000	19,554.000	76,39%
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	28.386.800	28.379.800	99,98%
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah sebagai bahan bacaan	31.836.000	30.320.000	95,24%
11.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	68.790.000	68.564.000	99,67%

12.	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi luar daerah	512.713.500	510.915.890	99,65%
13.	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	187.650.000	185.507.298	98,86%
Rata-rata pencapaian					91,90%

Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 91,90 %.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pembangunan Gedung Kantor	Tersediannya bangunan Gedung Kantor	132.938.000	127.685.250	96,05%
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	94.975.500	92.015.500	96,88%
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	190.938.540	181.862.750	95,25%
4.	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Pengadaan Meubelair	141.021.040	137.839.000	97,74%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	28.781.500	27.497.000	95,54%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas	116.464.576	116.449.830	99,99%
7.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	26.510.720	26.487.235	99,91%
Rata-rata pencapaian					97,02%

Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 97,02 %,

Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Tersedianya Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya.	20.000.000	19.700.000	98,50%
Rata-rata pencapaian					98,50%

Realisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah sebesar 98,50 %.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal	89.600.000	57.357.208	64,01%
Rata-rata pencapaian					64,01%

Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah sebesar 64,01 %.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	43.839.500	31.431.573	71,70%
2.	Pengadaan Alat studio dan komunikasi	Tersedianya alat studio dan komunikasi	130.300.000	112.174.200	86,09%
3.	Pengelolaan Website Daerah	Tersedianya website Daerah	193.703.000	169.614.500	87,56%
Rata-rata pencapaian					85,15 %

Realisasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa adalah sebesar 85,15 %.

Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Terselenggaranya Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	30.935.000	30.475.000	98,51%
Rata-rata pencapaian					98,51%

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 98,51 %.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Internet	Tersedianya jaringan internet	366.300.000	341.717.163	93,29 %
2.	Pengembangan Jaringan Komputer Kabupaten	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Komputer Kabupaten	55.320.000	52.062.000	94,11%
Rata-rata pencapaian					93,40%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika dengan realisasi sebesar 93,40 %.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelaksanaan Sampit Expo	Terselenggaranya Pelaksanaan Sampit Expo	30.300.000	29.350.000	96,86%
Rata-rata pencapaian					96,86%

Realisasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi mencapai 96,86%

Anggaran kinerja pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada prinsipnya meliputi tiga komponen pokok , yaitu 1.komponen pendapatan daerah, 2.komponen

belanja daerah, 3. komponen pembiayaan. Secara terperinci anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jenis Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
I	Pendapatan – LRA	602.000.000,00	0,00	0,00
II	Belanja – LRA	5.182.437.250,00	4.695.486.868,00	90,60
	Surplus/(Defisit)	(4.580.437.250,00)	(4.695.486.868,00)	
III	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	a. Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
IV	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00
V	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.580.437.250,00)	(4.695.486.868,00)	102,51

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka Realisasi APBD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 mengalami surplus/(defisit) sebesar Rp. 4.695.486.868,00,-. Belanja Langsung yang berhubungan dengan program dan kegiatan dalam APBD setelah perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.130.071.100,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.875.311.095,00,- atau mencapai 91,86 % . Dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang	
				(Rp)	(%)
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.130.071.100,00	2.875.311.095,00	(254.760.005,00)	91,86
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.438.143.724,00	1.321.592.886,00	(116.550.838,00)	91,90
01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	8.850.000,00	7.545.000,00	(1.305.000,00)	85,25
01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	7.545.000,00	(1.305.000,00)	85,25

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	141.900.000,00	99.144.703,00	(42.755.297,00)	69,87
01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.900.000,00	99.144.703,00	(42.755.297,00)	69,87
01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	15.300.000,00	3.259.600,00	(12.040.400,00)	21,30
01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	3.259.600,00	(12.040.400,00)	21,30
01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	322.664.584,00	280.405.095,00	(42.259.489,00)	86,90
01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	90.360.000,00	71.400.000,00	(18.960.000,00)	79,02
01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232.304.584,00	209.005.095,00	(23.299.489,00)	89,83
01.10	<i>Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	42.028.840,00	35.617.500,00	(6.411.340,00)	84,75
01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.028.840,00	35.617.500,00	(6.411.340,00)	84,75
01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	40.300.000,00	40.265.000,00	(35.000,00)	99,91
01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.300.000,00	40.625.000,00	(35.000,00)	99,91
01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	12.125.000,00	12.115.000,00	(10.000,00)	99,92
01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.125.000,00	12.115.000,00	(10.000,00)	99,92
01.13	<i>Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor</i>	25.599.000,00	19.554.000,00	(6.045.000,00)	76,39

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.599.000,00	19.554.000,00	(6.045.000,00)	76,39
01.14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	28.386.800,00	28.379.800,00	(7.000,00)	99,98
01.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.386.800,00	28.379.800,00	(7.000,00)	99,98
01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	31.836.000,00	30.320.000,00	(1.516.000,00)	95,24
01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.836.000,00	30.320.000,00	(1.516.000,00)	95,24
01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	68.790.000,00	68.564.000,00	(226.000,00)	99,67
01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.790.000,00	68.564.000,00	(226.000,00)	99,67
01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah</i>	512.713.500,00	510.915.890,00	(1.797.610,00)	99,65
01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	512.713.500,00	510.915.890,00	(1.797.610,00)	99,65
01.19	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>	187.650.000,00	185.507.298,00	(2.142.702,00)	99,86
01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.650.000,00	185.507.298,00	(2.142.702,00)	99,86

02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	731.629.876,00	709.836.565,00	(21.793.311,00)	97,02
02.03	Pembangunan Gedung Kantor	132.938.000,00	127.685.250,00	(5.252.750,00)	96,05
02.03.5.2.3	Belanja Modal	132.938.000,00	127.685.250,00	(5.252.750,00)	96,05
02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	94.975.500,00	92.015.500,00	(2.960.000,00)	96,88
02.07.5.2.3	Belanja Modal	94.975.500,00	92.015.500,00	(2.960.000,00)	96,88
02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	190.938.540,00	181.862.750,00	(9.075.790,00)	95,82
02.09.5.2.3	Belanja Modal	190.938.540,00	181.862.750,00	(9.075.790,00)	95,82
02.10	Pengadaan Meubelair	141.021.040,00	137.839.000,00	(3.182.040,00)	97,74
02.10.5.2.3	Belanja Modal	141.021.040,00	137.839.000,00	(3.182.040,00)	97,74
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.781.500,00	27.497.000,00	(1.284.500,00)	95,54
02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.781.500,00	27.497.000,00	(1.284.500,00)	95,54
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala	116.464.576,00	116.449.830,00	(14.746,00)	99,99

	kendaraan dinas/operasional				
02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.464.576,00	116.449.830,00	(14.746,00)	99,99
02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	26.510.720,00	26.487.235,00	(23.485,00)	99,91
02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.510.720,00	26.487.235,00	(23.485,00)	99,91
03	Program peningkatan disiplin aparatur	20.000.000,00	33.950.000,00	(3.300.000,00)	91,14
03.02	Pengadaan Pakainan dinas beserta perlengkapannya	20.000.000,00	19.700.000,00	(300.000,00)	98,50
03.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.700.000,00	(300.000,00)	98,50
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatus	89.600.000,00	57.357.208,00	(32.242.792,00)	64,01
05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	89.600.000,00	57.357.208,00	(32.242.792,00)	64,01
05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.600.000,00	57.357.208,00	(32.242.792,00)	64,01
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	367.842.500,00	313.220.23,00	(54.622.227,00)	85,15
15.03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi	43.839.500,00	31.431.573,00	(12.407.927,00)	71,70

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.839.500,00	31.431.573,00	(12.407.927,00)	71,70
15.04	Pengadaan alat dan studio komunikasi	130.300.000,00	112.174.200,00	(18.125.800,00)	86,09
15.04.5.2.3	Belanja Modal	130.300.000,00	112.174.200,00	(18.125.800,00)	86,09
15.08	Pengelolaan Website Daerah	193.703.000,00	169.614.500,00	(24.088.500,00)	87,56
15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.703.000,00	169.614.500,00	(24.088.500,00)	87,56
17	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	30.935.000,00	30.475.000,00	(460.000,00)	98,51
17.01	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	30.935.000,00	30.475.000,00	(460.000,00)	98,51
17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.935.000,00	30.475.000,00	(460.000,00)	98,51
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika	421.620.000,00	393.779.163,00	(27.840.8370,00)	93,40
19.01	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Internet	366.300.000,00	341.717.163,00	(24.582.837,00)	93,29
19.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	366.300.000,00	341.717.163,00	(24.582.837,00)	93,29
19.02	Pengembangan Jaringan Komputer Kabupaten	55.320.000,00	52.062.000,00	(3.258.000,00)	94,11

19.02.5.2.3	Belanja Modal	55.320.000,00	52.062.000,00	(3.258.000,00)	94,11
24	Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03	Pembangunan Jaringan Kabel Serat Optik	0,00	0,00	0,00	0,00
24.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02	Pengolahan , updating dan analisis data dan statistik daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	30.300.000,00	29.350.000,00	(950.000,00)	96,86
15.12	Pelaksanaan Sampit Expo	30.300.000,00	29.350.000,00	(950.000,00)	96,86
15.12.5.2.2	Belanja barang dan jasa	30.300.000,00	29.350.000,00	(950.000,00)	96,86
SURPLUS / (DEFISIT)		3.130.071.100,00	2.875.311.095,00	(254.760.005,00)	91,86

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan pagu setelah setelah perubahan sebesar Rp.1.438.143.724,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.321.592.886,00 atau sebesar 91,90 % , hal ini dikarenakan :

- a. Belanja Paket / Pengiriman , dengan realisasi 45,63 %, hal ini dikarenakan karena pengiriman banyak melewati email dan WA.
 - b. Belanja Penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik dengan realisasi 69,87 %. Untuk belanja ini terlalu tinggi menargetkan. Untuk Belanja Listrik dan Belanja kawat / faksimili/ internet / TV Kabel / TV satelit dengan rencana untuk 3 (tiga) Bidang.
 - c. Belanja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional dengan realisasi 21,30 %. Hal ini karena Kendaraan Dinas R2 dibayar oleh masing masing pemegang kendaraan.
 - d. Belanja Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan realisasi 86,90 %, karena berkurangnya pelaksana kegiatan / honor bendahara penerimaan tidak dibayarkan karena tidak ada realisasi penerimaan di tahun ini.
 - e. Untuk honorarium tim pengadaan barang dan jasa , terlalu tinggi menargetkan.
 - f. Untuk belanja penyediaan alat tulis kantor dengan realisasi 84,75 %, hal ini di karenakan realisasi sesuai dengan kontrak dan harga satuan.
 - g. Belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi sebesar 76,39 %, hal ini di karenakan terlalu tinggi volume di perubahan anggaran.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target sebesar Rp. 89.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 57.357.208,- atau sebesar 64, 01 %, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah tenaga ASN yang diberangkatkan untuk Bimtek.
 3. Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa dengan target sebesar Rp. 367.842.500,- realisasi sebesar Rp.313.220.273,- atau sebesar 85, 15 %. Hal ini dikarenakan
 - a. Kim tidak terselenggara karena tidak tersedia dana yang cukup.
 - b. Untuk kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi, dengan realisasi 86,09 % , hal ini dikarenakan harga satuan ketinggian, realisasi keuangan sesuai kontrak.
 - c. Untuk kegiatan Pengelolaan webside daerah dengan realisasi sebesar 87,56% , hal ini dikarenakan biaya hosting website masih menggunakan harga promo jika pembayaran dilakukan per 3 bulan dari Rp.8.700.000,00 menjadi Rp. 5.400.000,00 per 3 bulan sebelum Ppn.

- d. Pekerjaan Jasa Pembuatan Sistem Informasi Berbasis Website dengan nilai kontrak Rp.66.687.500,00 dan di bayarkan sesuai invoice, dikarenakan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh penyedia yaitu pelatihan operator dan administrator secara tatap muka , namun dilakukan secara online. Dan hal tersebut tidak mempengaruhi hasil akhir pekerjaan tersebut.
4. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 30.935.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.475.000,00 atau mencapai 98,51 %.
 5. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Telematika dengan pagu anggaran setelah perubahan Rp. 421.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 393.779.163,00 atau mencapai 93,40 %.
 6. Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 .
 7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00.
 8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 30.300.000,00 dengan realiasi sebesar Rp.29.350.000,00 .atau mencapai sebesar 96,86 %.

BAB IV

PENUTUP

Sepanjang tahun 2019, beberapa keberhasilan dan ketidakberhasilan telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur. Keberhasilan yang telah dicapai meliputi keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan tepat pada waktunya. Namun terdapat juga ketidakberhasilan yang masih terjadi di Diskominfo.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja serta solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah :

Tabel 4.1 Permasalahan dan Solusi Diskominfo tahun 2019

No	Permasalahan	Solusi
1	Terbatasnya kuantitas dan kompetensi SDM Diskominfo untuk melakukan pendataan dan perawatan infrastruktur jaringan internet dan/ intranet.	Usulan menambah PNS yang berkompeten
2	Belum memadainya jumlah SDM yang memenuhi kompetensi bidang TIK yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan tugas fungsi Diskominfo dalam urusan komunikasi dan informatika serta belum adanya penambahan formasi ASN dengan kompetensi bidang TIK	Melakukan perekrutan tenaga non PNS dengan kompetensi bidang TIK
3	Belum optimalnya kelembagaan Diskominfo	Usulan perubahan nomenklatur
4	Belum terbentuknya KIM di setiap kecamatan	Dilakukan sosialisasi langsung ke kecamatan tentang KIM
5	Luasnya cakupan infrastruktur	Pengadaan sarana berupa mobil operasional yang mendukung
6	Tingginya biaya investasi system jaringan internet	Perlunya dukungan

	karena luasnya cakupan	anggaran dari Pemerintah Daerah
7	Sulitnya memantau/monitoring isu publik dari beberapa media sosial secara manual	Perlunya dukungan aplikasi untuk memantau isu publik secara mudah dan cepat sehingga lebih efektif dan efisien

